Wujudkan Netralitas ASN, Pemkab Pasuruan Berpartisipasi Aktif Dalam Rakor Pengawasan dan Pengendalian 2024

Rabu, 7 Februari 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024 yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rakor ini bertujuan untuk mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bingkai Meritokrasi: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Rerformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya implementasi reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Ia meminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

MenPAN-RB juga menitikberatkan pada netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Ia meminta kepala daerah untuk mengedukasi ASN agar tidak terjadi pelanggaran netralitas, baik dalam Pilpres/Pileg maupun Pilkada. ASN diharapkan memegang teguh asas netralitas, bebas dari kepentingan politik, dan setia kepada prinsip-prinsip keberimbangan.

Plt. Kepala BKN, Haryono Dwi Putranto, menambahkan bahwa ASN yang tidak netral akan merugikan negara dan masyarakat, serta menjadikan ASN tidak profesional. Ia menekankan pentingnya ASN untuk memegang teguh asas netralitas.

Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, telah menginstruksikan kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Pasuruan untuk bersikap netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Ia berharap ASN Kabupaten Pasuruan dapat menjadi abdi negara yang profesional, tidak terlibat politik praktis, dan fokus melayani masyarakat untuk membangun Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.